

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Sumatra Barat telah banyak lahir tokoh politik dan pemerintahan. Mereka berperan dalam bidang masing-masing dan memberi kontribusi positif dalam membangun Sumatra Barat, seperti Hasan Basri Durin, Harun Zain, dan Azwar Anas yang riwayat mereka telah dibukukan dalam bentuk karya biografi.¹ Nama-nama tersebut adalah tokoh besar Sumatra Barat, namun masih sedikit yang menulis tokoh kalangan “bawah” atau tokoh yang berperan di tingkat nagari.

Salah satu tokoh lokal dari Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung yang memberikan kontribusi bagi pembangunan nagarinya adalah Nasirwan. Nasirwan lahir pada tanggal 25 November 1963 di Jorong Pintu Rayo, Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.² Nasirwan anak ke empat dari sembilan bersaudara. Nasirwan berasal dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Nazarudin dan ibunya bernama Putih Salpiah. Ayahnya bekerja sebagai petani sawah dan petani kebun karet di Jorong Pintu Rayo, Nagari Sumpur Kudus. Dari hasil petani tersebut mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Selain itu Nasirwan dari kecil memiliki jiwa sebagai pekerja keras dan semangat yang kuat untuk maju sebagaimana kebanyakan anak-anak petani di

¹Ayu Octari, “Biografi Seorang Pamong: Zainoen Mantan Bupati Pasaman 1966-1975”, *Skripsi* (Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang 2012), hal. 1.

²*Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasirwan*

kampungnya. Hal itu mengharuskan Nasirwan untuk membantu orangtuanya bertani di sawah.

Nasirwan menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, dan menduduki bangku pendidikan di Sekolah Dasar (SD) 2 Sumpur Kudus dan menamatkan pada tahun 1977.³ Sekolah Menengah Pertama di SMPN Silantai dan menamatkannya pada tahun 1981.⁴ Kemudian Nasirwan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Muhammadiyah Payakumbuh dan menamatkannya pada tahun 1983.⁵

Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA, Nasirwan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, namun pergi merantau ke Malaysia pada tahun 1984. Pada waktu itu selama beberapa tahun Nasirwan pergi merantau dan akhirnya tahun 1995 Nasirwan pulang kampung ke Nagari Sumpur Kudus.

Pada tahun 1996 Nasirwan menikah dengan seorang gadis bernama Susi Iswanti.⁶ Dari pernikahannya dengan Susi Iswanti, Nasirwan mempunyai tiga orang anak yaitu anaknya yang pertama bernama Nurul Hayati, yang kedua bernama Muhammad Hamizan, dan yang ketiga Muhammad Fakhri.

Pada tahun 1998 Nasirwan menjadi Ketua Pemuda Jorong Calau Nagari Sumpur Kudus. Selama menjadi ketua pemuda di Jorong Calau Nagari Sumpur Kudus. Nasirwan melakukan kegiatan di bidang olah raga, seperti membuat turnamen voli dan sepak bola antar nagari, serta melakukan pembinaan kepada

³ *Ijazah Sekolah Dasar Nasirwan*

⁴ *Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nasirwan*

⁵ *Ijazah Sekolah Menengah Atas Nasirwan*

⁶ *Surat Nikah Nasirwan tahun 1996*

pemuda-pemuda di Jorong Calau Nagari Sumpur Kudus. Sedangkan dalam bidang keagamaan, Nasirwan melakukan ta'ziah dan wirid. Wirid dilakukan 1 kali sebulan, sedangkan dalam bidang sosial Nasirwan melakukan kegiatan seperti mengumpulkan insert untuk ketua pemuda sebanyak Rp.25.000,-. Dana tersebut didapatkan dari sumbangan-sumbangan dari pasar Jorong Calau, Nagari Sumpur Kudus.⁷

Nasirwan juga melakukan kegiatan sosial lainnya, memberi bantuan dari pemuda yaitu seperti membeli kain kafan, papan, beli air dan lain-lain.⁸ Selain hal tersebut Nasirwan membuat lubuk larangan, sedangkan lubuk larangan tersebut dibuka satu kali dalam setahun dan dari acara tersebut banyak membuat pemuda dan masyarakat terhibur dengan kegiatan tersebut dan dalam membuka lubuk larangan ini juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Jorong Calau.⁹

Nasirwan menjadi ketua pemuda pada tahun 1998 di Jorong Calau, Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung yaitu karena didorong oleh masyarakat di Jorong Calau. Pada masa kepemimpinan Nasirwan sebagai Ketua Pemuda Jorong Calau, ia dapat menyelesaikan permasalahan seperti ada konflik antar kampung contohnya konflik Nagari Sumpur Kudus dan Nagari Unggan. Dengan jalan musyawarah diselesaikan oleh Nasirwan.

Pada tahun 2006 Nasirwan diangkat menjadi anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.¹⁰ Nasirwan menjadi anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) atas ajakan Sudarman Datuk Bandaro Itam, mantan wali nagari Sumpur Kudus. Nasirwan

⁷ Catatan Susunan Kepengurusan LPJC Periode 1998

⁸ Catatan dari LPJC Tahun 1998

⁹ Ibid.

¹⁰ Surat anggota BPN tahun 2006.

menjadi anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) sampai tahun 2007. Namun sebelum dilantik menjadi anggota BPN, Nasirwan mendapatkan tawaran untuk menjadi wali nagari sehingga ia mengundurkan diri sebagai anggota BPN.

Pada tahun 2007 Nasirwan mencalonkan diri menjadi wali nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Ada beberapa calon wali nagari pada saat itu yaitu, Syafri Kaldi, Satu Rahim, dan Nasirwan.¹¹ Pemilihan wali nagari melalui partisipasi masyarakat dalam pemerintahan nagari merupakan fenomena yang sangat menyokong bangunan yang kokoh dalam kepemimpinan pemerintahan nagari. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan wali nagari dan proses pembuatan kebijakan publik nagari menentukan terhadap penerimaan masyarakat terhadap kebijakan nagari sekaligus terbentuknya kesadaran bagi masyarakat untuk mematuhi segala tata aturan yang ada. Kesadaran yang tumbuh dalam diri masyarakat memberikan legitimasi yang kuat terhadap kebijakan yang dibentuk.¹²

Nasirwan mempunyai visi dan misi. Visi Nasirwan yaitu “terwujudnya masa depan, nagari aman, damai dan sejahtera dengan mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian”. Terwujudnya Nagari Sumpur Kudus sebagai nagari impian di tengah hutan, dengan jati dirinya dalam menuju masyarakat Sumpur Kudus yang madani.¹³

Sedangkan misi Nasirwan adalah dalam kehidupan keagamaan, adat istiadat dan sosial kemasyarakatan, membudidayakan tanaman karet, kakao

¹¹ Catatan Wali Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Tahun 2007.

¹² Marwansyah “Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Pemerintahan Nagari Minangkabau (Studi Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar)”, *Skripsi* (Padang: FISIP, 2003), hal.67.

¹³ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung Tahun 2013.

sebagai penunjang ekonomi masyarakat, meremajakan kembali tanaman karet yang sudah tua dan kurang menghasilkan, menggalakan tanaman pohon pinang sebagai tanaman pengganti pagar lahan perkebunan/ pekarangan rumah.¹⁴

Nasirwan terpilih sebagai wali nagari Sumpur Kudus dan dilantik pada tanggal 09 September 2007.¹⁵ Masa jabatan Nasirwan menjadi wali nagari yaitu sampai tanggal 09 September 2013. Selama menjadi wali nagari banyak hal yang dilakukan oleh Nasirwan untuk nagarinya. Hal tersebut terlihat dengan adanya kemajuan di bidang sarana dan prasarana di Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dalam bidang pendidikan yaitu mendirikan sekolah usia dini melalui dana PNPM dan TK di Nagari Sumpur Kudus, pada tahun 2008, sedangkan dalam bidang ekonomi yaitu memperbaiki pasar Calau serta membangun kios-kios pada tahun 2009.¹⁶

Setelah menjadi wali nagari Nasirwan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kabupaten Sijunjung. Nasirwan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yaitu dari tanggal 13 Agustus 2014 sampai 13 Agustus 2019.¹⁷

Pada saat menjabat sebagai anggota DPRD di Komisi III, Nasirwan melakukan kegiatan di bidang anggaran, yakni mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi

¹⁴*Ibid* hal. 4.

¹⁵ Surat Pengangkatan Wali Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Tahun 2007.

¹⁶ Rencana Defenitif (RD) Kegiatan Pembangunan Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2010.

¹⁷ Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung No. 17/ KTSP/ DPRD 2014.

kewenangan badan yang meliputi anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta anggaran belanja langsung.¹⁸

Penulisan sejarah dalam bentuk biografi tentang Nasirwan menarik untuk dikaji, karena sebelum ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, ia pernah menjadi Ketua Pemuda Jorong Calau dan menjadi Wali Nagari Sumpur Kudus. Berdasarkan kiprah yang dilakukan oleh Nasirwan itulah yang membuat tokoh ini menarik dan penting untuk dikaji. Melalui penulisan ini dapat dilihat kiprah, semangat, dan perjuangan Nasirwan terhadap bangsa dan negara serta kampung halamannya yang dapat dijadikan pembelajaran bagi generasi penerus, yang dapat dilihat dari pengalaman hidup tokoh ini.

Hal yang mendasari penulisan biografi Nasirwan : *Pertama*, belum ada yang menulis tentang riwayat hidup Nasirwan. *Kedua*, untuk mengetahui lebih dalam tentang Nasirwan yang merupakan seorang pelaku sejarah dari ketua pemuda sampai menjadi wali nagari dan anggota DPRD Sijunjung. Oleh sebab itu, penulis mengangkat topik dengan judul “ **Nasirwan: Perjalanan Anak Nagari Sumpur Kudus Menjadi Wali Nagari dan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung 1998-2016**”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan temporal, penulis mengambil waktu tahun 1998-2016. Tahun 1998, merupakan awal Nasirwan mengabdikan sebagai Ketua Pemuda Jorong Calau Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Batas akhir tahun 2016 dipilih karena pada tahun ini, Nasirwan masih menjadi anggota

¹⁸*Ibid.*

DPRD Kabupaten Sijunjung. Dengan demikian, biografi ini bersifat tematis karena dimana Nasirwan menjadi wali nagari hingga menjadi anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Sementara itu, pada batasan spasial, penulis memilih Nagari Sumpur Kudus. Pemilihan spasial ini karena fokus utama pada penelitian ini adalah di Nagari Sumpur Kudus, Kec. Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung.

Untuk mempertegas dan mengarahkan masalah dalam penulisan ini, maka rumusan masalah diupayakan mencari jawaban dari tokoh berikut ini:

1. Bagaimana masa kecil dan pendidikan Nasirwan sebelum menjadi Ketua Pemuda Jorong Calau Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus?
2. Bagaimana kiprah Nasirwan selama menjadi Ketua Pemuda dan Wali Nagari Sumpur Kudus?
3. Mengapa Nasirwan kemudian memasuki dunia politik?
4. Apa yang dilakukan Nasirwan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dari partai PPP?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memaparkan kehidupan dan perjuangan Nasirwan dalam membangun Nagari Sumpur Kudus. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Masa kecil dan pendidikan Nasirwan sebelum menjadi Ketua Pemuda Jorong Calau Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus .

2. Kiprah Nasirwan selama menjadi Ketua Pemuda sampai menjadi Wali Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
3. Kiprah Nasirwan memasuki dunia politik?
4. Mendeskripsikan kiprah Nasirwan selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Sijunjung .

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu: *Pertama* dari biografi Nasirwan adalah berusaha untuk memperoleh penjelasan serta gambaran yang utuh dari serangkaian proses yang dimaksud. Sehingga diharapkan menjadi suatu karya atau tulisan yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sejarah dan dapat mengenal sosok Nasirwan lebih dalam. *Kedua*, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bagian dari penulisan sejarah. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi orang lain dan generasi yang akan datang dalam meneliti pembahasan yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi mozaik bagian koleksi kepustakaan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya bagi masyarakat Nagari Sumpur Kudus.

D. Tinjauan Pustaka

Studi relevan dalam penelitian ini antara lain: buku terbitan Yayasan Obor Indonesia, karangan Abrar Yusra dan Hasril Chaniago, “Catatan Seorang Pamong: Hasan Basri Durin, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat

(1987-1997)". Dalam buku ini membahas tentang Nagari, Pemerintahan Desa dan Pembangunan.¹⁹

Buku terbitan Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatra Barat (KP3SB) karangan Sri Zul Chairiyah, "Nagari Minangkabau dan Desa Di Sumatra Barat. Dalam buku ini dijelaskan bentuk Pemerintahan Nagari sebelum diterapkannya UU. No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.²⁰

Buku yang tulis oleh Musyair Zainuddin, yang berjudul "Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau;" Buku tersebut membahas pemerintahan nagari dari sudut adat Minangkabau itu sendiri mulai dari sistem matrilineal, Minangkabau dan Islam sampai pada tanah ulayat di Minangkabau.²¹ Dalam buku ini menjelaskan tentang pemerintahan nagari sehingga bisa menjadi suatu pedoman pada masa pemerintahan Nasirwan menjadi wali nagari.

Skripsi yang relevan dalam penelitian ini antara lain seperti, skripsi Reni Silvia tentang, "Pemilihan Wali Nagari di Era Reformasi: Studi Tentang Pemilihan Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun (2001-2008)". Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana

¹⁹ Abbrar Yusra dan Hasril Caniago: *Catatan Seorang Pamong: Hasan Basri Durian Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatra Barat (1987-1977)*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1977), hal 102.

²⁰ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau Dan Desa Di Sumatra Barat*, Padang: Kp3SB (Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatra Barat), 2008. hal 1.

²¹ H. Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Minangkabau*, (Yogyakarta: Ombak, 2008) hal 47.

pemilihan wali nagari pada era reformasi. Sehingga bisa menjadi pedoman untuk melakukan penulisan dalam pembuatan skripsi ini²²

Skripsi Well Putra Herman, “Dinamika Pemerintahan Di Nagari Sumpur Kudus 1983-2012”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pemerintahan di Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.²³ Bisa menjadi pedoman untuk menulis skripsi ini yaitu tentang pemerintahan wali Nagari Sumpur Kudus pada masa Nasirwan menjadi wali nagari.

Skripsi Maizola Anggraini tentang, “ Biografi Lukman Bahri Datuk Rajo Bagoga: Dari Prajurit TNI Hingga Wali Nagari Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar 1971-2009”. Dalam skripsi ini dijelaskan bentuk kepemimpinan yang tegas dan tentang kiprah Lukhman Bahri selama menjadi seorang wali nagari di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar sebagai tanah kalahirannya.²⁴ Sehingga skripsi ini bisa menjadi pedoman dalam penulisan,, karena Lukhman Bahri menjadi wali nagari Tanjung Alam.

Skripsi Putri Yowanda tentang, “Haji Ali Usman Dt. Tumanggung: Sosok Pemimpin Nagari Barulak Dalam Beberapa Periode 1969-2010”. Dalam skripsi ini dijelaskan bentuk kepemimpinan Haji Ali Usman Dt. Tumanggung sebagai walinagari di nagari Barulak dalam tiga periode yaitu tahun 1969-1984 kemudian menjadi kepala desa 1984-2002 dan menjadi wali nagari 2002-

²² Reni Silvia, “Pemilihan Wali Nagari di Era Reformasi: Studi Tentang Pemilihan Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun (2001-2008)”, *Skripsi*, (Padang, Jurusan Sejarah, FIB, Unand, 2010).

²³ Well Putra Herman, “Dinamika Pemerintahan di Nagari Sumpur Kudus 1983-2012”, *Skripsi* (Padang, Jurusan Ilmu Sejarah, FIB, Unand, 2014).

²⁴ Maizola Anggraini, “ Biografi Lukman Bahri Datuk Rajo Bagoga: Dari Prajurit TNI Hingga Wali Nagari Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar 1971-2009”. *Skripsi* (Padang, Jurusan Sejarah, FIB, Unand, 2016)

2010.²⁵ Skripsi ini bisa menjadi pedoman karena dalam skripsi ini menjelaskan tentang kepemimpinan seorang dalam suatu Nagari Barulak.

E. Kerangka Analisis

Biografi adalah riwayat hidup dan pengalaman seorang tokoh yang menguraikan secara mendalam tentang perjalanan seorang tokoh. Biografi adalah uraian terinci, menyeluruh dan komprehensif tentang riwayat hidup seseorang atau tokoh tertentu. Biografi yang baik menurut Taufik Abdullah, merupakan biografi yang mampu dan sanggup menggugah kesadaran para pembacanya.²⁶ Biografi merupakan kisah nyata dari kehidupan seorang yang diuraikan secara tertulis oleh orang lain.²⁷ Pada intinya penulisan biografi bertujuan untuk menggambarkan watak atau pribadi dan pengalaman seseorang yaitu tokoh yang dikaji.²⁸ Untuk memahami dan mendalami kepribadian seseorang, dituntut pengetahuan tentang lingkungan sosial kultural dimana tokoh itu dibesarkan, proses pendidikan yang dilaluinya baik formal maupun nonformal.²⁹

Dalam penulisan biografi yang menelusuri riwayat hidup tokoh dapat dibedakan dalam tiga jenis penulisan yaitu penulisan berdasarkan susunan urutan waktu (kronologis), berdasarkan pemilihan topik tertentu (tematis), dan

²⁵ Putri Yowanda, "Haji Ali Usman Dt. Tumanguang: Sosok Pemimpin Nagari Barulak Dalam Beberapa Periode 1969-2010". *Skripsi*, (Padang, Jurusan Sejarah, FIS, UNP, 2012)

²⁶ Taufik Abdullah, "Mengapa Biografi", dalam *Prisma* No. 8 Agustus 1977, hal 117.

²⁷ *Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid I.* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1989), hal 380.

²⁸ R.Z. Leirisa, *Biografi Dalam Kumpulan Prasarana Pada Berbagai Lokakarya*, (Jakarta: Depdikbud, 1983), hal 34.

²⁹ Sartono Karoadirjo, *Pendekan Ilmu Sosial Dan Metodologi Sejarah.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993). hal 206

didasarkan pada kronologis dan tematis.³⁰ Dalam penulisan biografi Nasirwan didasarkan pada tematis berdasarkan pemilihan topik tertentu.

Dengan sendirinya biografi menempatkan manusia sebagai fokus kajian. Manusia yang dijadikan sebagai obyek kajian diposisikan memiliki “nilai lebih” yang akan digambarkan dalam perjalanan ketokohnya. Dalam biografi seorang tokoh menjadi pribadi dan sekaligus aktor dalam penulisannya. Setiap orang atau tokoh yang ditulis dalam kehidupan nyata tidak pernah bisa dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan kata lain menulis kehidupan biografi seseorang pada dasarnya juga mengungkapkan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang melahirkan tokoh tersebut.

Penulisan biografi Nasirwan mengungkapkan latar belakang sosial, dimulai dari masa kelahiran tokoh, remaja, dewasa, dari ketua pemuda, menjadi wali nagari, hingga menjadi anggota DPRD Sijunjung. Pendidikan formal maupun informal serta kehidupan keluarga, pergaulan, relasi dan kiprahnya bagi tanah kelahirannya.

Berdasarkan pengertian operasional, dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan memimpin, termasuk di dalamnya adalah membimbing, menuntut, mengarahkan, mem pengaruhi, mengendalikan (pikiran, perasaan dan tingkah laku), kemampuan diri, merangsang dan membangkitkan emosi. Kepemimpinan sebagai proses membujuk (*inducting*) orang-orang untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama.³¹

³⁰ Abdurrachman Surjomiharjo, *Menulis Riwayat Hidup, Dalam (Pemikiran dan Kesenjaraan: Suatu Kumpulan Prasarana Pada Berbagai Lokakarya)* (Jakarta:Depdikbud,1983), hal 71-72.

³¹ I Nyoman Sumaryadi, “Merajut Sendi-Sendi Kearifan Kepemimpinan Lokal/ Tradisional Menjadi Kepemimpinan Nasional Indonesia”. *Makalah* Dalam Materi Diskusi Ilmiah IPDN Pada Tanggal 11 Maret 2008.

I Nyoman Sumaryadi mengkategorikan tiga elemen defenisi operasional berdasarkan uraian di atas, yaitu: *Pertama*, kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (*relation concept*), kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang-orang lain, artinya ada pengikut, ada pemimpin, dan ada yang dipimpin. Tersirat dalam defenisi ini ada premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berrelasi dengan para pengikut mereka. *Kedua*, kepemimpinan merupakan suatu proses agar bisa memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu. *Ketiga*, pemimpin harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan melalui berbagai cara antara lain: menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan, dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengkomunikasikan sebuah visi. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi kerana sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut.³²

Dalam masyarakat Minangkabau seorang pemimpin haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu menurut adat Minangkabau yaitu "*baralam lapang*" yaitu berjiwa besar sebab pemimpin adalah *pusat jala, timbunan kapal* yaitu banyak bercorak ragam soal yang dihadapkan padanya dan yang akan dipecahkannya.

Sementara itu nagari adalah masyarakat suatu daerah yang berdiri sendiri dengan alat-alat perwakilan, hak milik, kekayaan dan tanah sendiri. Nagari merupakan suatu unit teritorial yang memiliki struktur politik dan aparat

³² *Ibid.*

hukumnya tersendiri.³³ Pemerintahan nagari adalah suatu struktur pemerintahan yang otonom punya territorial yang jelas dan menganut adat sebagai pengatur tata kehidupan anggotanya dan sekarang telah ditetapkan oleh pemerintah propinsi Sumatra Barat sebagai pengelola otonomi daerah terendah untuk daerah kabupaten.

Nagari-nagari di Minangkabau sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, nagari yang ada di Sumatera Barat adalah “negara” yang berpemerintahan sendiri, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah dan norma yang mengatur masyarakat dan umurnya juga sudah tua.³⁴ Nagari adalah bentuk organisasi kehidupan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku di daerah Sumatera Barat yang merupakan unit pemerintahan terendah dibawah kecamatan, dan juga merupakan kesatuan wilayah, kesatuan adat, dan kesatuan administrasi pemerintahan.³⁵

Tahun 2000 dikeluarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat No. 9 tahun 2000 (Perda No. 9) tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Berdasarkan perda No. 9/2000, masing-masing kabupaten yaitu sebanyak 8 kabupaten mulai menjabarkan kedalam peraturan daerah tentang pemerintahan

³³ Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perseftif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hal 27.

³⁴ Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hal 3.

³⁵ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau Dan Desa Di Sumatra Barat*, (Padang: Kp3SB(Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatra Barat), 2008. hal 1.

nagari yang mulai berlaku awal tahun 2001 telah menetapkan perda tentang pemerintahan nagari.³⁶

Nagari dikepalai oleh seorang wali nagari, yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat dan juga berdasarkan musyawarah niniak mamak pemangku adat nagari. Wali nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat nagari seperti sekretaris, bendahara, Kerapatan Adat Nagari (niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai), wali jorong, dan lainnya yang juga dirasa perlu. Begitu juga halnya dengan Nagari Sumpur Kudus yang juga dikepalai oleh wali nagari. Dalam hal ini tentu adanya perkembangan ataupun pembangunan nagari yang terjadi selama pemerintahan nagari. Semenjak diberlakukannya peraturan Undang-Undang No. 9 Tahun 2000, tentang pemerintahan nagari kembali ke nagari diberlakukan. Begitu juga halnya dengan Nagari Sumpur Kudus kembali ada, dengan diperintah oleh seorang wali nagari yaitu Nasirwan yang mulai berlaku masa pemerintahannya dari tahun 2007 hingga 2013.

Nasirwan merupakan pemimpin nagari, sekaligus tokoh politik lokal. Persoalan politik bersentuhan dengan ide-ide, azas, pembentukan negara, bentuk dan tujuan negara, di samping berkaitan dengan hal-hal seperti: kelompok penekan, kelompok kepentingan, kelompok elite, pendapat umum, peranan partai politik dan pemilihan umum. Individu yang melibatkan dirinya dalam permasalahan politik tersebut dengan politisi. Menurut Inu Kencana bahwa politisi berarti orang yang secara sadar berkecimpung dalam bidang politik.³⁷

³⁶ H. Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Minangkabau*, (Yogyakarta: Ombak, 2008). hal 47.

³⁷ Inu Kencana dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal.6-7.

Konsep tentang partai-partai politik di Indonesia menurut Soedjatmoko adalah wakil dari “kelompok-kelompok solidaritas budaya”. Clifford Geertz menganggap bahwa mereka memiliki berbagai macam aliran atau tradisi-tradisi budaya penting.³⁸

Maurice Duverger, melihat bahwa hakikat politik bersifat ambivalen. Di satu sisi politik merupakan konflik untuk meraih kekuasaan, dimana individu atau kelompok yang memegangnya cenderung untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat. Sedangkan individu atau kelompok yang berkuasa berusaha untuk menentang bahkan merebutnya. Di sisi lain politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan.³⁹

Partai politik pada dasarnya adalah salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi partai politik.

Untuk mempertajam analisis kajian ini, digunakan pandangan yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yakni bahwa sejarah politik tingkat lokal adalah peristiwa-peristiwa nasional yang menjadi bagian dari peristiwa lokal, bukan peristiwa lokal yang tetap lokal, akan tetapi lokal meningkat menjadi nasional, atau nasional yang meningkat menjadi internasional.⁴⁰ Defenisi tersebut memberi pemahaman tentang perbedaan politik tingkat lokal dengan politik lokal. Jika politik tingkat lokal adalah kepanjangan dari peristiwa-peristiwa nasional, maka

³⁸ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Anggota IKAPI 1992) hal.7.

³⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana 2010), hal.100.

⁴⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003) hal.186.

sebaliknya politik lokal adalah peristiwa-peristiwa lokal berhenti ditempat itu tanpa ada kaitannya dengan peristiwa nasional.⁴¹Demikian halnya dengan Nasirwan merupakan tokoh politik lokal yang berasal dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kabupaten Sijunjung. Meskipun Nasirwan tergolong orang lokal, namun keterlibatan di partai politik nasional (PPP) memungkinkan ia bersentuhan pula dengan perkembangan partai nasional.

Penulisan biografi baik itu biografi politik, pemikiran, kepemimpinan maupun perjuangan seseorang tokoh tidak saja akan diketahui tentang riwayat tokoh itu sendiri, tetapi juga akan tergambar lingkungan tempat tokoh tersebut berada. Biografi tentang Nasirwan ini menggambarkan tentang peristiwa yang dialami oleh tokoh ini. Mulai dari sejak kecil atau remaja dengan latar belakang sosial-politik pada masanya. Hal ini tentu untuk melihat hal-hal yang melatar belakangi pikiran dan tindakannya dikemudian hari.

F. Metodologi Penelitian dan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses yang mengkaji, menguji, serta menganalisis secara kritis kebenaran peristiwa masa lampau. Metode sejarah terdiri dari empat langkah atau tahap. Langkah-langkah dalam metode sejarah itu adalah heuristik (pengumpulan data), kritik, interpretasi, dan historiografi (penulisan).⁴²

⁴¹*Ibid.* hal.176.

⁴² Louis Gottschlk, *Mengerti Sejarah*,. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995). hal 32

Pertama, heuristik mencari dan menemukan sumber-sumber atau pengumpulan sumber yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Menurut Louis Gottschalk ada dua hal yang harus diperhatikan seorang peneliti dalam tahapan ini, yaitu pertama pemilihan subyek, kedua informasi tentang subyek.⁴³ Sumber dalam metode sejarah terdiri dari sumber primer dan sekunder.⁴⁴

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan bahan penelitian, terdiri dari arsip-arsip seperti Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Atas . Selanjutnya wawancara akan dilakukan dengan pelaku yaitu Nasirwan, tokoh masyarakat, sahabat masa kecil dan sahabat anggota DPRD Sijunjung. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang memperkuat atau mendukung sumber primer, buku-buku, makalah, dan skripsi yang di peroleh dari Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Kota Padang. Seperti buku Mengapa Biografi karangan Taufik Abdullah, catatan seorang pamong karangan Selo Sumarjan, pemerintahan nagari dan tanah ulayat karangan Sjahmunir.

Kedua, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Kritik menilai otentik atau tidaknya suatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber itu. Kritik meliputi kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (otentisitas sumber) seperti arsip yang ditemukan asli dan tidak ada masalah. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji kredibilitas sumber apakah sumber itu bisa dipercaya atau tidak.

⁴³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1999). hal 89

⁴⁴ Louis Gottschlk, *op.cit.* hal 35.

Ketiga adalah interpretasi analisis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber itu. Dalam hal ini juga adanya interpretasi dalam arti merangkaikan fakta-fakta lain menjadi suatu kesatuan pengertian. Tahap ini melakukan analisa berdasarkan fakta sejarah.

Keempat, historiografi, yaitu tahap penulisan. Pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya substansial dan akurat sehingga menghasilkan penulisan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Setiap bab tersebut akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

Bab I yaitu berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang latar belakang kehidupan dan latar belakang kampung atau nagarnya. Dalam bab ini akan dibahas masa kecil, dan keadaan lingkungan sekitar yang membentuk karakternya. Pendidikannya dan perjuangannya dalam menuntut ilmu, organisasi yang diikuti, selanjutnya aktifitas yang ia lakukan, masa berkeluarga atau menikah. Dalam hal ini akan dijelaskan tentang Nagari Sumpur Kudus, asal-usul dan perkembangan nagari sebagai tanah kelahiran Nasirwan.

Bab III membahas tentang kiprah Nasirwan selama menjadi seorang ketua pemuda sampai menjadi wali nagari di Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan

Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung sebagai tanah kelahirannya. Akan di jelaskan perkembangan nagari selama Nasirwan menjadi Ketua Pemuda, anggota BPN, dan waktu Nasirwan menjadi Wali Nagari.

Bab IV membahas tentang kiprah Nasirwan selama menjadi politikus dan anggota DPRD di Kabupaten Sijunjung. Bab ini juga menjelaskan tentang karir politik Nasirwan, peran partai politik dan tanggapan keluarga, masyarakat dan sahabat Nasirwan.

BabV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari bab terdahulu. Pada bab ini berisikan analisis dan interpretasi dari data-data yang telah didapatkan, sehingga dapat memberikan informasi baru kepada pembacaberisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.



